

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI  
KEBIJAKAN RESIDU PESTISIDA CHINA DALAM  
KOMODITAS EKSPOR CPO (*CRUDE PALM OIL*)  
periode (2008-2012)**

**Ditta Aprianty**

**ABSTRAK**

Hubungan Indonesia - China sudah terjalin cukup lama dan di segala bidang. Baik ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan negara eksportir kelapa sawit terbesar. China merupakan salah satu tujuan ekspor utama. Namun, kerja sama perdagangan kelapa sawit Indonesia - China tidak selalu berjalan lancar, meskipun China membutuhkan *Crude Palm Oil* (CPO) yang berasal dari sawit dalam jumlah besar untuk menyokong perekonomian dan kebutuhan energinya. Kendala bermula dari tahun 2010 ketika pemerintah China memberlakukan Kebijakan Residu Pestisida untuk mengatur standar Batas Maksimum Residu (BMR) pada CPO Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia tahun 2011 mengalami penurunan. Penurunan ini berdampak pada perekonomian nasional karena sawit adalah salah satu komoditas utama penyokong devisa negara. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai macam cara untuk mendongkrak kinerja ekspor CPO ke China, terutama melalui jalur diplomasi agar CPO Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar China. Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk tetap menjaga kepentingan perekonomian Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kontribusi besar ekspor CPO bagi perekonomian nasional. Konsep kepentingan nasional sendiri merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku negara. Dalam era perdagangan bebas, sudah seharusnya tidak ada hambatan dalam bentuk tarif yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perdagangan. Namun, China menyiasati dengan menerapkan hambatan non tarif berupa batas maksimal residu yang diperbolehkan dalam kelapa sawit yang boleh masuk ke China. Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia juga melalui Gabungan pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai asosiasi kelapa sawit yang mengupayakan agar volume ekspor CPO ke China meningkat. batasan Maksimum Residu atau hambatan non tarif yang diterapkan oleh China merupakan dampak dari pelemahan ekonomi yang juga terjadi di China sehingga impor kelapa sawit juga perlu dikurangi secara bertahap oleh pemerintah China untuk menjaga stabilitas ekonominya.

**Kata kunci:** Indonesia, China, Ekspor, CPO, Residu

# **INDONESIA'S EFFORTS TO DEALING WITH THE PESTICIDE RESIDUE POLICY CHINA IN COMMODITIES CRUDE PALM OIL (CPO) PERIOD 2008-2012**

**Ditta Aprianty**

## **Abstract**

Indonesia – China relations have been established longer and occur in all its scope, whether economic, social and political cooperation. As one of the largest palm oil producer in the world, Indonesia is the largest exporter of palm oil, and China is one of the main export destinations. However, the palm oil trade cooperation between Indonesia – China doesn't always go smoothly, although China needs Crude Palm Oil (CPO) from oil in large quantities, to support the economy and energy needs. Constraints began in 2010 when the Chinese government imposed a policy of standard setting maximum residue limit for oil. With this policy, the performance of Indonesia palm oil export to China gradually fell. This decrease impacts the national economy because oil is one of the main backbones of Indonesian export commodities. The government of Indonesia continues to perform a variety of ways to boost the performance of exports to China, primarily through diplomatic channels that the Indonesia CPO be accepted for entry into the China market. Diplomatic efforts by Indonesia to keep the national interest of the Indonesian economy. It was not separated from the oil major contribution to the national economy. The concept of national interest is itself a basis for explaining the behavior of the state in implementing the strategy to safeguard the interest of the state. In the era of free trade, it should be no obstacle in the form of rates that can be detrimental to either party in the trade. However, the Chinese work around this by applying non-tariff barriers in the form of maximum residue limit allowed in the palm oil sold in China. Diplomatic efforts by Indonesia also through Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) as palm oil association that seeks no reduction in the pesticide residue limits by the Chinese government. Non-tariff restriction applied in China is the impact of the economic downturn that also occurs in China that imports of palm oil also need to be reduced gradually by the Chinese government to maintain economic stability.

**Keywords:** Indonesia, China, Crude Palm Oil (CPO), Residue.